

PATRIARKI DALAM PERSPEKTIF PESANTREN

Suheri Sahputra Rangkuti¹
suheriray@gmail.com

Abstrak

This article reviews patriarchal practices in boarding schools with sociological analysis. Islamic boarding schools as the oldest education in this country are dynamic educational institutions and continuously strive to improve themselves. But even so, the pesantren which are integrated with the local culture where it was founded still inherits a patriarchal system which could be influenced by the environment including the local culture in which the pesantren was founded. This article is here to provide a kind of sociological reasons why the patriarchal system still resides in the pesantren realm, in order to attract readers to further research.

Keywords: Patriarchy, Islamic Boarding School.

A. Pendahuluan

Dalam masyarakat muslim, konstruksi sistem gender kontemporer dalam berbagai budaya memiliki variasi yang berbeda-beda, bergantung pada derajat perjumpaan antara faktor lokal, seperti agama, norma, hukum dan adat.² Perjumpaan antara kekuatan kultur lokal dan penafsiran agama akhir-akhir ini diangkat menjadi sebuah legitimasi untuk menentukan apa yang cocok untuk laki-laki dan perempuan. Bukan hanya itu, bertemunya dua kekuatan ini juga banyak membingkai kebijakan publik di masyarakat muslim, bahkan ada yang berubah menjadi PERDA. Lebih lagi sikap panatik umat Islam terhadap agamanya memuluskan syariat Islam masuk dalam hukum positif di negeri ini, sedikit tertinggal dengan hukum adat yang tidak begitu banyak diperjuangkan. Ironisnya, pemahaman agama yang sudah

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

² Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan Dalam Islam*, trans. Kurniasih, cet. I. (Bandung: Mizan, 2017), h. 17.

dibangun berdasarkan nilai patriarki lalu kemudian menjadi hukum positif ditambah dengan ajaran budaya yang berisfat patriarkis juga, memberi kesan, makin berterimanya sistem patriarki ini bahkan menembus alam sadar kaum perempuan untuk tidak mempermasalahkannya.

Menguatnya ortodoksi doktrinal dalam tubuh umat Islam juga menjadi salah satu faktor terrealisasinya patriarki lewat ajaran agama di masyarakat Islam di Indonesia. Padahal peran dan kontribusi kaum perempuan Islam era awal Indonesia sangat terlihat dan menjadi manuskrip sejarah betapa kaum perempuan Indonesia sangat tangguh untuk memperjuangkan bangsanya dan tidak ada pengekanan sama sekali dalam pergerakannya. Hal semacam ini ditunjang oleh kaum agamawan pada abad ke 17 dan 18, misal Abdurrauf al-Singkili yang menerima konsep *sultonah* (kepemimpinan perempuan) dalam sistem pemerintahan. Gejala peminggiran kaum perempuan secara doktrinal terlacak di abad ke 19 di masa Nawawi al-Bantani, khususnya melalui karyanya, *Syarh 'Uqud al-Lujay fi Bayan Huquq al-Zawjayn*, merupakan bukti ortodoksi ajaran agama yang mulai menegasikan kaum perempuan dalam kebijakan publik. Pangkal pemikiran ini dicurigai dari pengaruh ulama Timur Tengah yang memang secara sosial kemasyarakatan menempatkan perempuan pada posisi subordinatif.³

Lebih dalam lagi, Fadl melihat adanya ketimpangan dan ketidakadilan atas penafsiran agama terhadap kaum perempuan yang dilakukan oleh kaum lelaki. Kemudian tidak terhindarkan memicu pada penafsiran “bias jender”. Persoalan-persoalan fatwa hukum yang terkait dengan perempuan yang memiliki dampak luas di kalangan muslim pada umumnya ditentukan oleh kaum laki-laki dan melegalkannya dengan menggunakan kekutan otoritas yang menempel dalam diri lelaki yang sejak lama sudah menguasai lembaga

³ Azyumardi Azra and Idris Thaha, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*, Cet. 1. (Jakarta: Kencana kerja sama dengan UIN Jakarta Press, 2012), h. 140.

publik.⁴ Indikasi tentang adanya bias jender dalam penafsiran agama ini menandakan adanya monopoli kepentingan terutama dari aspek politik yang secara tidak langsung melahirkan staus quo.

Pendidikan pesantren tradisional terlahir dari kaum pinggiran dengan khas kelas ekonomi menengah ke bawah. Menurut Weber, di dalam masyarakat proletariat cenderung menjadikan agama sebagai anak tangga untuk menuju kelas sosial yang diakui. Terlebih-lebih dalam masyarakat agraris, dalam keyakinan kaum agraris, menyenangkan Tuhan adalah sebuah tugas penting, gunanya untuk menjaga murka Tuhan agar Tuhan tidak menimpakan bencana dan menyesuaikan cuaca bagi pertanian mereka, lebih jelasnya, makin ketat pengamalan agama seseorang maka makin diakui posisinya di tengah-tengah masyarakat karena menurut mereka telah mampu menyenangkan Tuhan.⁵ Hadirnya agama dalam membentuk kelas sosial di tengah-tengah masyarakat agraris, bila disatukan secara esoteris dengan analisis Azra di atas, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa motif utama kaum agamawan dalam Islam untuk menerapkan pengetatan/ortodoksi terhadap paham keagamaan, terkesan berorientasi melanggengkan status quo di tengah-tengah mencuatnya pergulatan politik keagamaan di tanah air.

Dengan demikian, dari analisis di atas, tidak tertutup kemungkinan bahwa sistem dan praktik patriarki, baik ia disengaja atau tidak, masih bersemayam di alam pesantren. Secara runut penulis menjelaskan dan mendialogkan hal-hal yang sering terindikasi mengidap bias jender di alam pesantren dengan analisis teori sosial, di antaranya, respon pesantren terhadap perempuan, perempuan dalam sistem kepemimpinan di pesantren, bias jender dalam teks-teks pembelajaran dan maskulinitas norma di pesantren.

⁴ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name* (England: 10 Bloomsbury Street London WC1B 3SR, 2001), h. 223.

⁵ Max Weber, *The Sociology of Religion*, trans. Yudi Santoso (Jogjakarta: IRCiSod, 2012), h. 286.

B. Pembahasan

1. Respon Pesantren Terhadap Perempuan

Adalah sebuah fakta bahwa pondok pesantren menyimpan sejuta keunikan. Hal ini tidak bisa dibantah dikarenakan lembaga pendidikan tertua di negeri ini memiliki pola tersendiri di tiap daerah di nusantara. Perbedaan corak yang dimaksud adalah perbedaan tradisi pondok yang mengadopsi kultur lokalitas (*wisdom*) lingkungan di mana ia berdiri. Sementara nusantara tempat menjamurnya pesantren, dihuni oleh bermacam ragam suku dan budaya. Itulah sebabnya, pesantren di setiap daerah akan terlihat punya entitas tersendiri dan melekat menjadi sebuah identitas. Meski demikian, perbedaan pola dan tradisi antara satu sama lain bukanlah dalil untuk tidak mengatakan pesantren juga memiliki persamaan, justru keunikan pesantren yang paling mencolok itu menurut penulis adalah adanya kesamaan-kesamaan pola antara satu sama lain kendati keberadaannya terletak pada lokalitas dan kultur yang berbeda. Sebagai perekat yang menciptakan persamaan di batang tubuh pesantren adalah kesamaan ideologi madzhab yang membentuk cara pandang para pimpinan pondok pesantren dalam mendayuh biduknya untuk tiba dalam tujuan-tujuan yang sama.⁶

Di era awal, pesantren pada umumnya hanya menerima santri laki-laki. Dalam perkembangannya, pada sekitar tahun 1910an pesantren mulai menerima santri perempuan. Kemudian, muncullah sebuah inovasi baru untuk mendirikan pesantren yang hanya dikhususkan untuk perempuan saja, katakanlah misalnya, pesantren Denanyar didirikan pada tahun 1917.⁷ Hal ini menjadi semacam wajah baru dalam lembaga yang menamakan diri sebagai pesantren tersebut. Masuknya perempuan ke pesantren, menurut Harder menjadi cikal bakal mulainya gerakan pendidikan perempuan di kalangan

⁶ Pesantren yang dimaksud dalam makalah ini adalah pesantren tradisional, bukan pesantren modern atau pesantren yang didirikan oleh ormas atau lembaga yang menganut ideologi Islam trans-nasional, terkesan menegaskan *localwisdom*.

⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: Anggota IKAPI, 1985), h. 54.

kaum santri. Pada tahun 1934 sebagai penguatan dan dorongan terhadap pendidikan perempuan, NU (sebagai kaum santri) mengadakan kongres pertama dalam menggalakkan pendidikan untuk kaum perempuan.⁸

Secara historis, memang tidak bisa dibantah bahwa pendidikan untuk kaum perempuan sejak pesantren era awal hingga saat ini bisa dikatakan terbuka lebar tanpa hambatan. Bila dirujuk kepada data yang dikeluarkan kemenag pada tahun 2012, bisa dilihat bahwa jumlah santri perempuan dan laki-laki saat ini hampir berimbang, yaitu, 49,81% santri perempuan dan 50,19% santri laki-laki. Data ini dihimpun dari seluruh pondok pesantren dengan berbagai tipenya. Data tahun 2012 itu juga kemenag mencatat, populasi dari pesantren tradisional (*salafiyah*) lebih dominan dibanding dengan pesantren tipe lain, yaitu, 53,10% tradisional (*salafiyah*), 28,38% modern (*khalafiyah*) dan pesantren yang mengkombinasikan antara tradisional dan modern, sejumlah 18,52%.⁹ Dengan demikian, dari data ini, rasional bila dikatakan bahwa sekitar 50% santri perempuan duduk di pesantren tradisional. Ironisnya, dalam rilis kemenag 2012 ini juga memperlihatkan data tenaga pendidik dan jabatan fungsional di dalam struktur pondok pesantren, terkesan lebih didominasi oleh laki-laki dengan selisih yang tidak berimbang, yaitu, 66,87% laki-laki dan 33,13% perempuan.¹⁰ Artinya, banyaknya santri perempuan di pesantren tradisional tidak diimbangi dengan tenaga pendidik atau peluang untuk jabatan fungsional bagi kaum perempuan.

Kondisi ini akan memberi kesempatan di mana norma dan nilai tertentu memiliki banyak peluang untuk menjadi dominan.¹¹ Nilai dan norma yang

⁸ Pieterella van Doorn-Harder, *Women Shaping Islam: Indonesian Women Reading the Qur'an* (Urbana: University of Illinois Press, 2006), h. 174.

⁹ <http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontrenanalisis.pdf>, dilihat pada 12 juli 2018

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Smith Doroty, *The Evryday World as Problematic, A Feminist Sociology* (Toronto: Universitas Of Toronto Press, 1991), h. 54.

dominan akan dianggap sebagai pengetahuan yang menjadi acuan bagi setiap individu. Oleh karenanya, dominasi laki-laki atas perempuan sangat memungkinkan termarginalkannya kaum perempuan dalam interaksi sosial pondok pesantren. Lebih mengganggu lagi, bahwa perbedaan biologis yang dominan ini pun melahirkan mekanisme kebijakan yang mengatur wilayah agama, ekonomi melalui wacana publik dan kegunaannya.¹²

2. Perempuan dalam Sistem Pesantren

Sesuai data kemenag di atas, keterlibatan laki-laki dalam sistem pesantren lebih mendominasi, meskipun santri perempuan hampir berimbang banyaknya dengan laki-laki. Hal ini menyisakan tanda tanya, kenapa demikian adanya? Tentu ini bukan sebuah kebetulan tanpa penyebab, tetapi menjadi semacam tradisi kolektif yang hidup di internal keluarga kiai pimpinan pondok. Menurut Steenbrink Penyebab utamanya tidak lain adalah pondok masih dianggap milik pribadi bukan wakaf meskipun memiliki badan wakaf sendiri. Sehingga terjadi anggapan dikalangan para keluarga kiai bahwa pondok pesantren itu adalah harta pusaka yang sistem peralihannya melalui konsep waris/turun temurun.¹³ Pesantren yang dianggap sebagai harta pusaka, mengarahkan pandangan internal keluarga untuk memilih anak laki-laki ketimbang perempuan meskipun kompetensi dan keunggulan-keunggulan dalam membina pesantren tersebut lebih dimiliki oleh anak perempuan dan secara turun temurun diwariskan. Posisi Konstruksi gender dalam keluarga kiai mengambil bentuk determinasi yang menyumbang pengaruh besar dalam menentukan penerus atau pewaris tahta untuk melanjutkan dan mengembangkan pesantren yang mereka miliki.

¹² Michael Foucault, *History of Sexuality. Volume 1: An Introduction*, trans. Robert Hurly (New York: Vintage Books, 1990), h. 24–26.

¹³ Karel A Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994), h. 116.

Menurut Azra, termarginalkannya kaum perempuan dalam sistem pesantren bukanlah semata-mata karena dipengaruhi oleh tradisi dan sosio-kultural yang melakat dalam Islam. Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa tradisi sosial dan *indegnous* lokalitas lah yang secara inheren memberi pengaruh tersebut.¹⁴ Argumen ini ia sandarkan kepada fakta historis Islam era awal di Indonesia, dalam pada itu, perempuan muslimah banyak mengambil peran dalam perjuangan bahkan memimpin peperangan. Sama halnya dengan azra, penulis melihat bahwa bias jender dalam sistem sruktur kepemimpinan dalam pesantren tidak semata-mata dipengaruhi teologi tetapi *indegnous* lokal yang tidak menerima. Karena perempuan dalam masyarakat budaya biasanya identikkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumahan, seperti, memintal benang dan menjahit.¹⁵

Berbeda dengan azra yang menapikan pengaruh agama dalam kausus tersebut secara mutlak, penulis melihat ada celah lain dengan pengandaian, jika kasus ini di pandang dari sudut Marxisme yang meyakini struktur material menentukan hubungan lak-laki dan perempuan.¹⁶ Maka adanya pengaruh pemahaman agama atas termarginalkannya kaum perempuan dalam sistem kepemimpinan pesantren sangat masuk akal, termasuk adanya bias jender dalam teori-teori penciptaan dalam Islam, yang mengatakan, perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki (Adam). Berdasarkan kisah ini, baik muslim maupun non-muslim percaya bahwa Adam diciptakan melalui cara yang lebih unggul dari Hawa. Penafsiran ini telah menjadi kebenaran publik yang menentukan bagaimana status laki-laki dan perempuan sebagai

¹⁴ Azra and Thaha, *Pendidikan Islam*, h. 139.

¹⁵ Max Weber, Talcott Parsons, and Anthony Giddens, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (London: Routledge, 2002), 160, accessed July 14, 2018, <http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9780203995808>.

¹⁶ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial, Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Cet. I. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 148.

manusia.¹⁷ Yang berimplikasi terhadap pembentukan level hierarkis dalam stratifikasi dan kelas sosial.

Lebih jauh lagi, jika melacak keakar historis sebelum Indonesia menjadi negara, bentuk dari sistem pemerintahan nusantara adalah monarki yang patriarki. Fakta ini juga tidak bisa dinegasikan pengaruhnya dalam pemikiran sistem pemerintahan di Indonesia baik dalam struktur kepemimpinan apapun, termasuk di antaranya, kepemimpinan dalam pesantren. Monarki yang patriarki tampil sebagai kerajaan Tuhan di muka bumi sangat berimplikasi kepada tatanan sosial masyarakatnya, termasuk, aturan hukum dan pola perekonomian di dalamnya.¹⁸ Yang sudah barang tentu sistem aturan patriarki akan menegasikan kaum perempuan dalam kebijakannya termasuk tentang pola-pola kepemimpinan. Bahkan mengabaikan espektasi dan pengalaman perempuan dalam sistem sosial.

Selanjutnya, jika dipandang lewat kaca mata mikro-sosiologi, faktor perkawinan dalam adat setempat juga bisa mempengaruhi terbaikannya perempuan dalam sistem kepemimpinan pesantren yang disebabkan perkawinan eksogam (calon mempelai dari tempat lain).¹⁹ Pasalnya, mayoritas masyarakat Indonesia menganut patrilineal, artinya, istri ikut suami. Dalam kondisi seperti ini, maka anak laki-laki lah yang diberi tanggung jawab dalam mengelola harta waris keluarga. Jika tidak ada anak laki-laki misalnya, biasanya anak perempuan tertua yang menetap di tempat asalnya (endogam dan tidak berpindah) yang akan menjadi pengelola harta waris keluarga, tapi walaupun begitu, menantu laki-laki tetap menjadi pilihan utama keluarga dalam mengelola pesantren. Bahkan tidak jarang menempati kekuasaan tertinggi dari struktur kepemimpinan pesantren. Yang pada

¹⁷ Anwar, *Jati Diri Perempuan Dalam Islam*, h. 108.

¹⁸ Michel Foucault and Colin Gordon, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*, 1st American ed. (New York: Pantheon Books, 1980), h. 158.

¹⁹ Hiroko Horikoshi, *A Tradition Leader In a Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Java*, trans. Umar Basalim and Andi Muarly Sunarwa, Cet. I. (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1987), h. 46.

akhirnya, pesantren tidak pernah sepi dan keluar dari kekuasaan laki-laki dan akan tetap berada di tangan mereka.

Penegasian kaum perempuan dalam sistem kepemimpinan pesantren tidak semata-mata mutlak, artinya bukan tidak ada sama sekali yang masuk dalam struktur. Akan tetapi kebanyakan dari kaum perempuan lebih menduduki posisi yang selama ini dianggap lebih layak mereka duduki, katakanlah misalnya, jabatan sebagai sekretaris, kepala bidang kebersihan dan perlengkapan di pesantren. Pesantren dengan unsur perempuan yang berimbang lebih diharapkan, untuk dapat ikut menentukan kebijakan dan aturan-aturan yang bisa memenuhi harapan dan memberi jalan lebar untuk bebas berekspresi sesuai dengan kebutuhan santri perempuan.

3. Bias Jender dalam Teks-teks Pembelajaran Pesantren

Kitab kuning sebagai kurikulum pondok tradisional mengacu kepada kitab-kitab klasik yang muktabaroh dan di ukur lewat geneologis madzhab. Lebih jelasnya, sebuah kitab, baru boleh dipelajari di pesantren bila kitab tersebut mengacu kepada aliran yang dipandang sebagai ahlussunnah waljamaah. Kitab kuning tersebut harus berisi paham Asy'ari dari segi teologi, madzhab syafii dari segi fiqh dan al-Ghazali dari segi tasawuf.²⁰ Disamping itu, seperti, pelajaran sejarah dan ilmu-ilmu alat, agaknya, tidak terlalu diseleksi paham dan aliran yang dianut oleh penulisnya. Hal ini dikarenakan ilmu alat maupun sejarah tidak begitu mempengaruhi sikap dan cara keberagamaan.

Penelitian terkini yang dilakukan oleh Burdah menginformasikan bahwa kitab-kitab keislaman (kitab kuning) yang ada dipesantren masih mampu bertahan dan tidak mengalami perubahan, bahkan diterjemahkan oleh banyak

²⁰ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat*, Cet. I. (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), h. 87.

kalangan dengan bahasa yang mudah di pahami.²¹ Dengan kata lain, pesantren masih eksis mempertahankan cirinya sebagai lembaga pendidikan yang berpegang kepada warisan masa lalu. Di lain pihak, justru bertahannya kitab klasik tanpa adanya reinterpretasi akan kandungan dan materi yang *include* dalam tema-tema pembelajaran, menyisakan pemahaman-pemahaman dengan bias jender yang amat kental. Sebut saja misalnya kitab, *Ghayah at-Taqrīb*, kitab fiqh yang mengikuti rute *syafiiyah* ini masih bias jender di dalamnya terasa sangat *rigid*, sebagai contoh, konsep perwalian, kesaksian. Bukan hanya kitab *Ghayah at-Taqrīb*, kitab standar dalam hadis pun banyak memuat hadis-hadis yang secara turun-temurun masih dijelaskan dengan cara pikir missoginik, seperti kitab *AbiJamrah*²², Syarqawi (kitab fiqh di atas *Ghayah at-Taqrīb*), Tafsir *Jalain* dan kitab-kitab lainnya. Pada umumnya masih satu nada dan menempatkan perempuan sebagai obyek fiqh.

Keberadaan perempuan di gawang epistemologi di masa lalu hampir tidak terlibat. Hingga kebanyakan dari ahli agama dalam Islam di priode klasik rata-rata berjenis kelamin laki-laki. Di tambah lagi dengan sistem pemerintahan monarki yang patriarki di dunia Islam di masa itu. menambah kesan, bahwa adanya persengkokolan dalam aturan kebijakan publik antara penguasa dan ahli agama. Kemunculan intrepretasi agama sesuai dominasi jender dan ideologi kekuasaan di masanya tidak mungkin terelakkn.²³ Meski tidak semua aturan yang ada merugikan kaum perempuan sepenuhnya, namun dominasi maskulin kebijakan publik yang memarginalkan kaum perempuan yang terhimpun dalam kitab klasik menyisakan isarat bahwa

²¹ Noorhaidi Hasan et al., *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi Dan Kontestasi*, Cet. I. (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), h. 237.

²² Kitab ringkasan *Shahih* Bukhari Muslim yang memuat tema-tema tentang masalah keimanan, fiqh dan akhlak

²³ Michael Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*, trans. Alan Sheridan (New York: Vintage Books, n.d.), h. 27.

adanya unsur patriarki dan politik perbedaan jenis kelamin hingga mengakibatkan kaum perempuan tersubordinasi dan selalu jadi obyek.²⁴

Sebagaimana yang saya ungkapkan di awal, bertahannya kitab klasik dengan tidak menggeser *setting-sosial* yang ada di dalamnya seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, pesantren berhasil memproteksi ideologi trans-nasional dan di sisi lain menjadi bumerang terhadap santri perempuan. Pembedaan laki-laki dengan perempuan dalam khazanah Islam klasik memiliki diamertral yang amat tajam. Terkhusus lagi pada kebijakan publik, karena konstruksi jender patriarki hanya memandang perempuan berada dalam wilayah privat domestik. Sementara sektor publik identik dengan laki-laki.²⁵

Dampak dari akar masalah ini memberi peluang dan legalitas bagi kaum laki-laki untuk superioritas di alam pesantren, termasuk ketika diadakannya pembelajaran dan program-program ekstrakurikuler. Laki-laki cenderung di berikan pembekalan yang menguntungkan di antaranya, cara bertani, berdagang dan beternak. Sementara pembekalan yang diberikan kepada perempuan biasanya, menjahit, memasak dan tata rias. Dalam perlombaan-perlombaan yang biasa diadakan di pesantren pun dibedakan lewat jenis kelaminnya yang selalu memperlihatkan simbol bahwa laki-laki lebih tangguh ketimbang perempuan. Katakanlah misalnya, bagi laki-laki, berenang, silat, main bola, bahkan hampir semua jenis olah raga tidak boleh dan dianggap layak mereka pertandingan. Sedangkan bagi santri perempuan cenderung dibatasi pada olah raga yang dianggap ringan, misalkan memanah, tarik tambang, dan sejenisnya. Kebijakan-kebijakan yang mengatur tata tertib di pesantren juga tidak bisa dihindarkan dari bias jender. Seperti sanksi yang diberikan kepada para santri ketika pulang tanpa izin mengalami penanganan yang berbeda. Biasanya santri laki-laki cukup dihukum dengan hukuman

²⁴ Kate Millet, *Sexual Politics* (Illionis: University of Illionis Press, 2000), h. 23.

²⁵ Rosemarie Putnam Tong, *Pemikiran Feminis: Pengantar Paling Konfrehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005).

ringan seperti, kebersihan lapangan dan kamar mandi. Akan tetapi, perempuan justru malah lebih dari hukuman laki-laki, ditambah dengan stigma negatif dari stereotip gender yang akan ia terima dan panggilan orang tua.

4. Maskulinitas Norma di Pesantren

Lingkungan pesantren pada umumnya---merujuk pada penelitian Stenbrink---terdiri dari, rumah kiai, sebuah tempat peribadatan yang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, dan pemondokan (asrama) sebagai tempat tinggal para santri baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam pesantren yang besar, maka pemondokan dan asramanya juga banyak. Layaknya sebuah desa tersendiri, lengkap dengan pusat perbelanjaan dan tempat-tempat berkumpul.²⁶ Pemondokan para santri diperuntukkan agar lebih menghayati dan langsung bisa mengamalkan pembelajaran yang disuguhkan oleh para kiai.

Dalam penelitian Dhofier, santridilihat dari cirinya terbelah menjadi dua, pertama, santri mukim, yaitu, santri yang berasal dari daerah jauh dan menetap dalam kelompok pesantren, kedua, santri kalong, yaitu, santri yang berasal dari desa-desa yang berada di sekeliling pesantren.²⁷ Artinya, menetap atau tidaknya seorang santri di pesantren dipengaruhi oleh jarak, yang tidak memungkinkan santri untuk pulang, baik laki-laki maupun perempuan. Waktu libur resmi, seperti, libur-libur nasional, dan libur kenaikan kelas adalah waktu yang sering dipergunakan oleh para santri untuk pulang, di luar waktu tersebut diperbolehkan pulang jika mendapat izin dari pihak pesantren.

Seiring kian banyaknya peminat pesantren, pesantren pun bertumbuh dan berkembang pesat mulai dari perbaikan dan penambahan sarana prasarana dan perluasan wilayah untuk menampung santri yang berdatangan dari

²⁶ Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, h. 39.

²⁷ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, h. 51-52.

berbagai daerah. Sehingga membentuk kelompok dalam elemen pesantren sebagai masyarakat pesantren. Dalam pada itu, adanya kelompok masyarakat merupakan satu tarikan napas dengan adanya aktivitas sosial yang terlahir dari interaksi antar perorangan maupun kelompok.²⁸ Tentu dengan adanya interaksi sosial dalam masyarakat pesantren membutuhkan norma yang mengatur lalu lintas jalannya interaksi. Norma sebagai sebuah standar atau kode yang memandu perilaku, terlahir dari kesepakatan payung budaya maupun agama setempat yang berguna sebagai proteksi kondisi interaksi agar tidak melahirkan gesekan antara individu maupun kelompok.

Di pesantren pada umumnya, aturan tertulis itu lebih kepada merefleksikan norma agama yang disetujui oleh sekelompok pengambil kebijakan. Sepintas lalu, perumusan ini hal yang lumrah dan terjadi secara normal. Akan tetapi, bila diperhatikan lebih detail lagi, struktur dan pengambil kebijakan di pesantren yang secara dominan dikuasai oleh laki-laki tidak tertutup kemungkinan terjadinya bias gender dalam perumusan setidaknya kaidah atau aturan yang diberlakukan, berangkat dan diproduksi oleh pola pikir yang maskulin. Bagi kaum laki-laki di pesantren, aturan yang diterapkan dari kolaborasi ajaran agama yang diterjemahkan oleh sekelompok pengambil kebijakan yang didominasi kaum laki-laki, hampir pasti tidak mengalami jarak dari frekuensi harapan dan pengalaman kaum laki-laki di pesantren, meski tidak semuanya aturan tersebut menempati posisinya sebagaimana mestinya. Akan tetapi, aturan yang dirumuskan sekelompok laki-laki tanpa melibatkan kaum perempuan di dalamnya, hanya akan memproduksi aturan maskulin. Faktanya memang begitu, sebut saja misalnya aturan berkomunikasi bagi santri perempuan dengan lawan jenisnya (yang bukan mahram dari santri perempuan) sama sekali tidak dibolehkan, bahkan aturan-aturan ini banyak yang bersifat berlebihan sehingga

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), h. 51.

membatasi ruang gerak santri perempuan, termasuk di antaranya keterbatasan dalam kesempatan untuk menimba ilmu di luar pesantren akibat kekhawatiran yang berlebihan yang muncul dari pikiran maskulinitas dan stereotip gender.²⁹

Aturan yang bersifat maskulin ini juga menyentuh organisasi putri di pesantren. Banyak event penting yang diadakan oleh kemenag dan membuka kesempatan untuk diikuti oleh kaum perempuan namun dapat penolakan akibat pola berpikir maskulin tersebut. Misalkan olah raga voli dan badminton, dikarenakan pakaian yang digunakan dianggap tidak Islami, karena dalam aturan pesantren pakaian perempuan memiliki batas-batas tertentu dan tidak ada pengecualian baik di dalam wilayah pesantren maupun di luar lokasi.³⁰ Hal ini tentu akan menghambat potensi-potensi yang ada pada santri perempuan dan akan berdampak kepada hasil pendidikan pesantren tersebut. Maka tidak heran bila santri laki-laki lulusan pesantren lebih menonjol dalam hal kecakapan hidup dikarenakan aturan bagi mereka tidak tertutup aturan bagi santri perempuan.

C. Kesimpulan

Sesuai fenomena sosiologi pesantren, nilai-nilai patriarki masih bersemayam di alam pesantren. Meski pesantren membuka jalan lebar bagi perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan pesantren, namun, pesantren terlihat belum menukar konstruk struktur sosial sebagai dasar tindakan dalam interaksi di alam pesantren. Sehingga tidak bisa membendung penafsiran agama, norma dan nilai-nilai yang terkandung di alam pesantren. Dampaknya, pesantren belum berhasil untuk memenuhi harapan kaum perempuan. Kolaborasi antara kekuatan kultur lokal dan

²⁹ Lihat di [portalgaruda.org/article.php?article=299064&val=5943&title=Pendidikan Perempuan di Pondok Pesantren](http://portalgaruda.org/article.php?article=299064&val=5943&title=Pendidikan%20Perempuan%20di%20Pondok%20Pesantren), di akses 16 juli 2018

³⁰ Lihat di [portalgaruda.org/article.php?article=299064&val=5943&title=Pendidikan Perempuan di Pondok Pesantren](http://portalgaruda.org/article.php?article=299064&val=5943&title=Pendidikan%20Perempuan%20di%20Pondok%20Pesantren), di akses 16 juli 2018

agama yang sudah sejak sekian lama menyentuh alam sadar masyarakat pesantren yang berimplikasi terhadap hilangnya kesadaran ilmiah ikut menyumbang langgengya budaya patriarki di pesantren.

Dekonstruksi pesantren kedepan, diharapkan memulai pembacaan dari tinjauan sosial, setidaknya memberi inspirasi baru dalam merumuskan apa saja *treatment* pengelola kedepan. Poin ini dipandang penting karena pengelolaan pesantren semestinya tidak hanya membakukan aturan yang sudah ada sejak lampau akan tetapi perlu ada pemugaran disebabkan masyarakat pesantren adalah kelompok atau individu di masanya, apalagi dengan realitas sosial yang begitu cepat berubah dan berkembang. Tentu hal yang demikian tidak bisa tidak akan merubah pranata masyarakat pesantren agar bisa menyesuaikan dengan zamannya.

Daftar Pustaka

- Anwar, Etin. 2017.*Jati Diri Perempuan Dalam Islam*. Translated by Kurniasih. Cet. I. Bandung: Mizan.
- Azra, Azyumardi, and Idris Thaha. 2012.*Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*. Cet. 1. Jakarta: Kencana kerja sama dengan UIN Jakarta Press.
- Bruinessen, Martin Van. 2012.*Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat*. Cet. I. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1985.*Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Doorn-Harder, Pieterella van. 2006.*Women Shaping Islam: Indonesian Women Reading the Qur'an*. Urbana: University of Illinois Press.
- Doroty, Smith. 1991.*The Evryday World as Problematic, A Feminist Sociology*. Toronto: Universitas Of Toronto Press.

- El Fadl, Khaled Abou. 2001.*Speaking in God's Name*. England: 10Bloomsbury Street London WCIB 3SR.
- Foucault, Michael. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books, n.d.
- Foucault, Michel, and Colin Gordon. 1980.*Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. 1st American ed. New York: Pantheon Books.
- Foucault, Michael. 1990.*History of Sexuality. Volume 1: An Introduction*. Translated by Robert Hurly. New York: Vintage Books.
- Hasan, Noorhaidi, Suhadi, Munirul Ikhwan, Moch. Nur Ikhwan, Najib Kailani, Ahmad Rafiq, and Ibnu Burdah. 2018.*Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi Dan Kontestasi*. Cet. I. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- Horikoshi, Hiroko. 1987.*A Tradition Leader In a Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Java*. Translated by Umar Basalim and Andi Muarly Sunarwa. Cet. I. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Millet, Kate. 2000.*Sexual Politics*. Illionis: University of Illionis Press.
- Putnam Tong, Rosemarie. 2005.*Pemikiran Feminis: Pengantar Paling Konfhrensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Soekanto, Soerjono. 1986.*Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Steenbrink, Karel A. 1994.*Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Supardan, Dadang. 2007.*Pengantar Ilmu Sosial, Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara.
- Weber, Max. 2012.*The Sociology of Religion*. Translated by Yudi Santoso. Jogjakarta: IRCiSod.

Weber, Max, Talcott Parsons, and Anthony Giddens. 2002. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. London: Routledge.

Dari Internet:

<http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontrenanalisis.pdf>, dilihat pada 12 juli 2018

[portalgaruda.org/article.php?article=299064&val=5943&title=PendidikanPerempuan di Pondok Pesantren](http://portalgaruda.org/article.php?article=299064&val=5943&title=PendidikanPerempuan%20di%20Pondok%20Pesantren), di akses 16 juli 2018